

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertahanan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik (Undang-Undang No. 24 tahun 2004)

Penyebab kemiskinan secara umum dibagi menjadi dua, yaitu kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Suryawati (2005, hlm. 122) menjelaskan bahwa kemiskinan kultural disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar. Sedangkan kemiskinan struktural disebabkan rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan.

Kabupaten Bandung Barat adalah kabupaten baru di Provinsi Jawa Barat yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung Barat baru menginjak usia 10 tahun setelah pemekaran pada tahun 2007 lalu. Bagi daerah yang masih berkembang tentunya sedang giat-giatnya melakukan pembangunan. Permasalahan yang dihadapi oleh daerah yang sedang berkembang tentunya selain infrastruktur, dan indeks pembangunan manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi juga masih menjadi masalah yang utama termasuk kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat ini (mediaindonesia.com, 2015).

Berdasarkan data dari Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Kota, pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin di Bandung Barat mencapai 197,9 ribu jiwa dengan garis kemiskinan Rp. 264.244 dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 205,7 ribu jiwa dengan garis kemiskinan Rp. 275.327. Dari data tersebut

dapat dikatakan bahwa jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Bandung Barat masih banyak dan terus meningkat setiap tahunnya. Sampai saat ini jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bandung Barat masih terkonsentrasi di Kecamatan Cihampelas.

Ditengah pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat disertai dengan pembangunan infrastruktur yang sedang giat dilakukan, persoalan kesejahteraan menjadi isu strategi di wilayah pedesaan terutama Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. Hal tersebut ditunjukkan melalui data Dinas Sosial bahwa Kecamatan Cihampelas menempati peringkat pertama dengan jumlah masyarakat miskin tertinggi di Kabupaten Bandung Barat. Data Dinas Sosial menunjukkan angka Kemiskinan Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut :

Tabel 1.1
Sebaran Penduduk Miskin Kabupaten Bandung Barat

No.	Kecamatan	Individu	Rumah Tangga
1	Batujajar	25.665	7.133
2	Cihampelas	60.747	15.956
3	Cikalong	41.068	11.554
4	Cililin	43.281	11.960
5	Cipatat	51.204	14.039
6	Cipeundeuy	32.854	9.482
7	Cipongkor	44.678	12.065
8	Gununghalu	24.659	7.706
9	Lembang	51.085	14.645
10	Ngamprah	36.191	10.517
11	Padalarang	47.327	13.617
12	Rongga	25.984	7.536
13	Saguling	18.599	5.615
14	Sindangkerta	26.350	7.438
15	Cisarua	16.119	5.409
16	Parongpong	17.037	5.017

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat, 2017

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Kecamatan Cihampelas memiliki jumlah masyarakat miskin tertinggi di Kabupaten Bandung Barat yaitu sebanyak 15.956 Rumah Tangga atau 60.747 Individu. Sehingga diperlukan adanya penelitian mengenai kemiskinan di Kecamatan Cihampelas terutama kemiskinan multidimensi agar fenomena kemiskinan dapat dijelaskan secara akurat.

Undang Undang nomor 26 tahun 2007 secara formal bahwa yang dimaksud dengan Pedesaan (*Rural*) ialah kawasan yang mempunyai kegiatan utama yang dilakukan adalah pertanian maupun pengelolaan sumber daya lainya bersifat agraris. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa sektor utama dalam mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat adalah di sektor pertanian. Selain itu dilihat dari aspek pendidikan, jumlah usia anak sekolah dari jenjang Sekolah Dasar hanya satu pertiga yang melanjutkan ke Sekolah Menengah. Selanjutnya akses kesehatan di Kecamatan Cihampelas belum sepenuhnya memadai, dimana jumlah tenaga kesehatan yang masih sedikit dan hanya memiliki dua puskesmas (BPS, 2017).

Kemiskinan di wilayah pedesaan ini sangat penting untuk dikaji melihat tingkat kemiskinan di pedesaan yang masih tinggi jika dibandingkan dengan perkotaan (Balai Statistik Daerah, 2017; BPS). Selain akses mobilitas yang kurang memadai, lapangan pekerjaan di pedesaanpun masih tergolong rendah jika dibandingkan di perkotaan. Hal ini dapat memicu kesenjangan yang semakin curam antara pedesaan dan perkotaan jika masalah kemiskinan belum menemukan solusi yang tepat. Selain itu, jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Bandung Barat mengalami peningkatan di tahun 2017, yaitu sebanyak 159.419 Rumah Tangga Miskin dibandingkan tahun 2015 yang sebanyak 142.069 Rumah Tangga Miskin (Bappeda 2016; Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat).

Dalam hal pembangunan, desa memang selalu terbelakang jika dibandingkan dengan perkotaan. Hal ini diungkapkan oleh Muhi (2013) mengenai pembangunan di desa yang terkesan lamban dan cenderung terbelakang karena kurangnya perhatian dan bantuan serta stimulan dari pihak-pihak luar desa dan pemerintah sehingga pembangunan di desa berjalan dalam kecepatan yang rendah. Padahal di lain sisi, pembangunan desa adalah penting di negara-negara yang

sedang berkembang karena desa merupakan pintu masuk pembangunan daerah, bahkan berbagai metode telah dibuat dan digunakan oleh organisasi-organisasi yang terlibat dalam pembangunan internasional, seperti di Afrika yang telah dibangun sebuah program Desa Milenium (*Millennium Vilages*) mengingat pentingnya peran desa dalam pemberantasan kemiskinan (Luthfia, 2013, hlm. 139).

Perkembangan studi mengenai kemiskinan, beberapa tahun belakang ini dikembangkan konsep kemiskinan multidimensional yang dikembangkan oleh UNDP. Pada tahun 2010 *United National Development Program* (UNDP) dan *Oxford Poverty and Human Development Initiative* (OPHI) menyepakati sebuah pengukuran kemiskinan baru melalui *Multidimensional Poverty Index* (MPI) yang dimuat dalam *Human Development Report* (HDR) tahun 2010. Perbedaan yang mendasari konsep perhitungan *Multidimensional Poverty Index* dibandingkan dengan *Basic Needs Approach* yaitu terletak pada aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam pengukuran, yaitu diantaranya dimensi pendidikan, dimensi kesehatan, dan dimensi standar kualitas hidup. Kemiskinan memiliki hubungan terhadap dimensi pendidikan, kesehatan dan standar hidup, hal ini dikarenakan keterbatasan pendapatan yang dimiliki oleh rumah tangga sehingga tidak mampu mengakses terhadap dimensi tersebut secara menyeluruh. Sebagaimana Sen (2000) menyebutkan bahwa kemiskinan harus dilihat dari berbagai dimensi seperti kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup, demokrasi dan kebebasan masyarakat terhadap akses ekonomi (BPS, 2016).

Berdasarkan ulasan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan ini dalam bentuk penelitian dan dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“Studi Deskriptif Kemiskinan Masyarakat Pedesaan (Survey pada Masyarakat Miskin di Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat).”**

1.2 Rumusan Masalah

- 1 Bagaimana gambaran umum kemiskinan ditinjau dari aspek pendidikan di wilayah Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat ?

2. Bagaimana gambaran umum kemiskinan ditinjau dari aspek kesehatan di wilayah Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat ?
3. Bagaimana gambaran umum kemiskinan ditinjau dari aspek standar kualitas hidup di wilayah Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat ?
4. Bagaimana gambaran umum *Mulridimensional Poverty Index* di Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal di bawah ini:

1. Gambaran umum kemiskinan ditinjau dari aspek pendidikan di wilayah Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat.
2. Gambaran umum kemiskinan ditinjau dari aspek kesehatan di wilayah Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat.
3. Gambaran umum kemiskinan ditinjau dari aspek standar kualitas hidup di wilayah Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat.
4. Gambaran umum *Multidimensional Poverty Index* di Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 2 yakni :

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis penelitian ini memperluas wawasan berkenaan dengan studi kemiskinan menggunakan pendekatan Kemiskinan Multidimensi di wilayah pedesaan.
- b. Memberikan sumbangsih pada studi permasalahan pembangunan terutama kemiskinan di pedesaan.
- c. Sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dijadikan masukan bagi para pengambil keputusan yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan.

1.5 Struktur Organisasi Penulisan Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini, penulisan dibagi menjadi beberapa bab, pada tiap-tiap babnya dibagi dalam beberapa sub bab, pada tiap-tiap subnya memiliki hubungan dengan bab tersebut. Berikut kelengkapan dari setiap babnya.

Bab pertama pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktik, dan struktur organisasi penulisan skripsi.

Bab kedua tinjauan pustaka yaitu konsep dan jenis kemiskinan, garis kemiskinan, penyebab kemiskinan, pengukuran kemiskinan, gambaran kemiskinan pedesaan, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

Bab ketiga metode penelitian terdiri dari objek dan subjek penelitian, populasi dan sampel penelitian, definisi operasional variabel, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, pengujian instrument penelitian dan teknik analisis data.

Bab keempat hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

Bab kelima kesimpulan dan saran yang terdiri dari kesimpulan, saran, dan implikasi.